

TINJAUAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON

Muhammad Rais

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
Email : muhammadrais456@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyusunan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara (*Interview*), Dokumentasi, Studi kepustakaan (*library research*). Data analisis dengan Metode deskriptif dan Metode Komparatif. Penyusunan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, hal itu dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran yang anggaran belanjanya tidak satupun mengalami penyimpangan yang tidak menguntungkan (realisasi tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan) sehingga penyimpangan menguntungkan ini akan menjadi penghematan dimana dalam penyusunan anggaran, Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kabupaten Buton menggunakan data dan informasi yang bersumber dari pengalaman dan juga data aktual tahun-tahun sebelumnya.

Kata Kunci : Anggaran, Perencanaan, Pengendalian

ABSTRACT

This study aims to determine the role of budgeting as a means of planning and control at the General Hospital of Buton. Data collection methods used were interviews (*Interview*), documentation, literature study (*library research*). Data analysis with descriptive method and the Comparative Method. Budgetary Regional General Hospital Buton serves as a means of planning and control, it can be seen from the budget realization that budgets none of the irregularities that are not profitable (realization does not exceed a set budget) so this would be a profitable deviation where savings in budget formulation, Hospital Financial Management Board Buton using data and information sourced from the experience and also the actual data of the previous years

Key Word : Budgeting, Planning, Controlling

1. PENDAHULUAN

Anggaran belanja pembangunan merupakan alat pengendalian terhadap pelaksanaan belanja pembangunan, karena anggaran belanja pembangunan merupakan tolok ukur sampai sejauh mana pelaksanaan operasional pembangunan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan [1]. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan meningkatkan efisiensi kerja. Untuk mencapai efisiensi kerja ini, salah satu alat pengukurnya adalah Anggaran. Anggaran merupakan hasil perencanaan manajemen yang sangat penting, karena dengan hasil menganalisa anggaran ini, manajemen dapat memperkirakan berapa target belanja yang harus dibelanjakan agar tidak jauh menyimpang dari anggaran yang disediakan. Anggaran yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu penyusunan anggaran yang matang dan teliti akan membantu manajemen dalam mencapai tujuan.

Selain sebagai alat perencanaan, anggaran juga merupakan alat pengendalian, yang berfungsi untuk menilai hasil pelaksanaan dari suatu rencana. Jadi, keberhasilan manajemen dalam melaksanakan fungsi anggaran akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan sistem pengendalian yang ada dalam suatu organisasi yang bersangkutan. Setelah tahun anggaran berakhir, manajemen akan mengevaluasi, yaitu dengan cara membandingkan laporan realisasi dengan anggaran. Dengan diterapkannya anggaran, manajemen dapat menilai apakah setiap unit kerja telah bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana.

Pengendalian mengukur pelaksanaan kerja atau prestasi dengan membandingkan terhadap rencana dan tujuan. Meskipun perencanaan dilakukan terlebih dahulu, tetapi tidak akan berhasil dengan sendirinya tanpa bantuan dari pengendalian manajemen. Rencana membimbing pimpinan yang memakai sumber-sumber untuk mencapai tujuan, sedangkan pengendalian memonitor kegiatan untuk menentukan apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengendalian manajemen mencakup sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari atas tatanan organisasi, wewenang, tanggung jawab, dan informasi untuk memungkinkan pelaksanaan pengendalian dan untuk memproses sekumpulan tindakan yang memastikan bahwa organisasi bekerja untuk pencapaian tujuan [2].

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja sektor publik. Sektor publik juga diperlukan sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan. Tetapi untuk pelaksanaan fungsi birokrasi pemerintah, keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor privat. Otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk lebih mendekatkan pelayanan masyarakat di daerah sesuai kebutuhannya, sehingga dengan demikian pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya semangat otonomi harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi seluruh fungsi-fungsi pemerintah yang telah didesentralisasikan [3].

Rumah Sakit Pemerintah memiliki peran yang strategis. Disamping, sebagai sebuah garda depan pelayanan masyarakat juga dituntut untuk dikelola layaknya sebuah bisnis yang dapat memberikan manfaat financial bagi pemerintah. oleh karena itu, seyogyanya pengelolaan sebuah rumah sakit seperti layaknya sebuah perusahaan dengan mengedepankan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Sebagai sebuah unit bisnis, maka rumah sakit perlu membuat pengendaian atas operasi untuk kegiatan yang dilakukannya. Dengan menggunakan perhitungan maka dibuatlah suatu anggaran atas target dan sumber daya yang diperlukan di masa yang mendatang. Anggaran memiliki peranan sebagai alat perencanmn dan pengendalian serta evaluasi, karena anggaran disusun dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, keadaan yang sedang terjadi sekarang ini dan peramalan yang akan datang yang dapat berorientasi jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu anggaran juga berperan sebagai alat peringatan dini akan adanya in-efisiensi dan in-efektivitas, dimana fungsi ini sangat besar nilainya bagi perusahaan.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan [4]. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton. Sampel dalam penelitian ini adalah Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2013 dan 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian atau penjelasan baik lisan maupun tulisan mengenai keadaan perusahaan [5].
- b. Data Kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung atau dalam bentuk angka-angka yang berhubungan dengan laporan keuangan [6].

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang relevan dengan penganalisan masalah, yaitu :

1. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan pengamatan secara langsung melalui observasi dan wawancara pada bagian perusahaan, khususnya bagian keuangan, serta sejumlah informasi yang terkait, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap yang berhubungan dengan penulisan ini.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) penulis menggunakan beberapa teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas [7].

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

- a. Metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu .
- b. Metode komparatif, yaitu melakukan perbandingan terhadap data-data yang terkumpul, dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi [8]. Disamping itu, juga dengan cara membandingkan kebijakan yang berlaku di RSUD Kabupaten Buton dan kebijakan yang berlaku secara teoritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengamatan

Tinjauan Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton

Anggaran dapat dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan fungsi pengendalian. Dengan adanya anggaran maka standar kerja sudah ada, kemudian sistem akuntansi akan menjadi angka realisasi yang dapat dibandingkan dengan standar atau sasaran, yaitu anggaran. Pengendalian harus dilakukan secara berkala sepanjang periode dan bukan hanya akhir periode saja. Penilaian pada akhir periode saja akan menyebabkan keterlambatan untuk melakukan perbaikan maka sebaliknya laporan kinerja dibuat setiap bulan. Proses pengendalian dirancang untuk membantu memantau aktivitas yang sedang berjalan dari suatu unit usaha, biasanya terdiri dari beberapa tahap:

1. Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya,
2. Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil aktual beserta hasil yang direncanakan dan selisih dari kedua angka tersebut,

3. Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dan hasil yang direncanakan dan mencari sebab-sebab penyimpangan tersebut,
4. Mencari dan mengembangkan tindakan alternatif untuk mengatasi masalah dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses di suatu bidang tertentu,
5. Memilih (tindakan korektif) dari kumpulan alternatif yang ada dan menerapkan tindakan tersebut [9].

Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari tindakan diterapkan dengan adanya umpan maju untuk membuat perencanaan periode berikutnya. Perbandingan antara hasil aktual dengan tujuan yang direncanakan merupakan pengukuran efektivitas pengendalian selama periode tertentu di masa lalu. Hal ini memberikan dasar untuk memberikan umpan balik yang efektif.

Adapun fungsi anggaran sebagai alat pengendalian pada Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, yaitu:

1. Memberikan standar yang memadai untuk mengukur prestasi,
2. Perbandingan seberapa jauh pelaksanaan rencana kerja yang telah dicapai unit kerja,
3. Mengendalikan operasional dan belanja serta pengeluaran,
4. Mencegah terjadinya pengeluaran yang berlebihan.

Penganggaran merupakan sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan secara luas untuk menjalankan tanggung jawab manajerial. Dengan adanya anggaran maka standar kerja pada Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton sudah ada, kemudian sistem akuntansi atau sistem informasi lainnya akan menjadi angka realisasi yang dapat dibandingkan dengan standar atau sasaran, yaitu anggaran. Perbedaan antara anggaran dan realisasi disebut penyimpangan atau variance. Penyimpangan terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu :

1. Penyimpangan yang menguntungkan,
2. Penyimpangan yang tidak menguntungkan [10].

Penyimpangan-penyimpangan tersebut baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan akan dievaluasi, dan hasil evaluasinya akan menjadibahkan pertimbangan untuk menyusun anggaran periode berikutnya yang disusun berdasarkan pengalaman dan data aktual dari tahun-tahun sebelumnya.

Pembahasan

Untuk melihat bagaimana fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton dapat dilihat dari hasil yang dicapai, yaitu laporan anggaran realisasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 yang disajikan dalam tabel 1 Tentang laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

Tabel 1

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Aktual-Realisasi) Tahun 2013

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan	1.755.362.000	1.755.362.000	0,00	0,00
4.1	Pendapatan asli daerah	1.755.362.000	1.755.362.000	0,00	0,00
4.1.2	Hasil retribusi daerah	1.755.362.000	1.755.362.000	0,00	0,00
5	Belanja	11.094.358.050	14.289.512.00	3.195.153.950	28,80
5.1	Belanja tidak langsung	7.460.645.500	7.658.712.500	198.067.000	2,65
5.1.1	Belanja pegawai	7.460.645.500	7.658.712.500	198.067.000	2,65
5.2	Belanja langsung	3.633.712.550	6.630.799.500	2.997.086.950	82,48
5.2.1	Belanja pegawai	353.750.000	362.400.000	8.650.000	2,45
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.319.913.732	2.560.451.500	1.240.537.168	93,99
5.2.3	Belanja modal	1.960.048.818	3.707.948.000	1.747.899.182	89,18

Sumber : RSUD Kabupaten Buton 2015

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun 2013 realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 1.755.362.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 1.755.362.000 terjadi selisih Rp 0,00 atau sebesar 0,00%

b. Retribusi Daerah

Pada Tahun 2013 realisasi Retribusi Daerah adalah sebesar Rp 1.755.362.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 1.755.362.000 terjadi selisih Rp 0,00 atau sebesar 0,00%

2. Belanja

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

Pada Tahun 2013 realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp 6.488.197.473 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 7.857.493.712 terjadi selisih Rp 1.369.296.239 atau sebesar 82,57%

2) Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai

Pada Tahun 2013 realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp 143.420.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 156.050.000 terjadi selisih Rp 12.630.000 atau sebesar 91,91%

b) Belanja Barang dan Jasa

Pada Tahun 2013 realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 1.428.597.630 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 1.519.006.550 terjadi selisih Rp 90.408.920 atau sebesar 94,05%

c) Belanja Modal

Pada Tahun 2013 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp 1.742.590.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 1.958.656.000 terjadi selisih Rp 216.066.000 atau sebesar 88,97%.

Tabel 2

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Aktual-Realisasi) Tahun 2014

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan	1.500.000.000	4.600.000.000	3.100.000.000	206,67
4.1	Pendapatan asli daerah	1.500.000.000	4.600.000.000	3.100.000.000	206,67
4.1.2	Hasil retribusi daerah	1.500.000.000	4.600.000.000	3.100.000.000	206,67
5	Belanja	14.145.469.500	17.510.342.500	3.364.873.000	23,79
5.1	Belanja tidak langsung	9.064.830.500	10.339.703.500	1.274.873.000	14,06
5.1.1	Belanja pegawai	9.064.830.500	10.339.703.500	1.274.873.000	14,06
5.2	Belanja langsung	5.080.639.000	7.170.639.000	2.090.000.000	41,14
5.2.1	Belanja pegawai	419.400.000	460.650.000	41.250.000	9,84
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.473.056.000	3.340.964.000	1.867.890.000	126,80
5.2.3	Belanja modal	3.188.183.000	3.369.043.000	180.860.000	5,67

Sumber : RSUD Kabupaten Buton 2015

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun 2013 realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 1.765.981.550 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 1.988.417.000 terjadi selisih Rp 222.435.450 atau sebesar 88,81% sedangkan pada tahun 2014 realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 4.516.823.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 4.600.000.000 terjadi selisih Rp 83.177.000 atau sebesar 98,19%.

b. Retribusi Daerah

Pada Tahun 2013 realisasi Retribusi Daerah adalah sebesar Rp 560.725.200 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 600.000.000 terjadi selisih Rp 39.274.800 atau sebesar 95,62% sedangkan pada tahun 2014 realisasi Retribusi Daerah adalah sebesar Rp 1.319.943.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 1.500.000.000 terjadi selisih Rp 180.057.000 atau sebesar 93,45%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun 2013 realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp 1.205.256.350 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 1.388.417.000 terjadi selisih Rp 183.160.650 atau sebesar 86,81% sedangkan pada tahun 2014 realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp 3.021.091.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 3.100.000.000 terjadi selisih Rp 78.909.000 atau sebesar 97,45%.

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Pada Tahun 2013 realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp 6.488.197.473 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 7.857.493.712 terjadi selisih Rp 1.369.296.239 atau sebesar 82,57% sedangkan pada tahun 2014 realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp 8.960.958.072 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 10.339.703.500 terjadi selisih Rp 1.378.745.428 atau sebesar 86,66%.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Pada Tahun 2013 realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp 143.420.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 156.050.000 terjadi selisih Rp 12.630.000 atau sebesar 91,91% sedangkan pada tahun 2014 realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp 433.522.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 460.650.000 terjadi selisih Rp 27.128.000 atau sebesar 86,66%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Pada Tahun 2013 realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 1.428.597.630 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 1.519.006.550 terjadi selisih Rp 90.408.920 atau sebesar 94,05% sedangkan pada tahun 2014 realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 3.340.946.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 3.361.030.549 terjadi selisih Rp 20.084.549 atau sebesar 99,76%.

3) Belanja Modal

Pada Tahun 2013 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp 1.742.590.000 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 1.958.656.000 terjadi selisih Rp 216.066.000 atau sebesar 88,97% sedangkan pada tahun 2014 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp 3.249.488.230 sedangkan yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 3.369.043.000 terjadi selisih Rp 119.554.770 atau sebesar 96,45%.

Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton telah berfungsi sebagai alat perencanaan karena dari segi perencanaan angka standar yang tersaji pada laporan anggaran tahun 2013-2014 dan realisasi tahun 2013-2014 berfungsi sebagai multiplier yang

akurat, oleh karena itu anggaran dapat dengan mudah disesuaikan dengan tingkat kegiatan yang sebenarnya tanpa perlu khawatir bahwa pengubahannya akan bersifat berlebihan ataupun terlalu minim. Rata-rata anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 2013 dan 2014 hanya terjadi sedikit selisih dengan realisasinya baik itu dalam penyimpangan menguntungkan maupun tidak menguntungkan dengan adanya perencanaan yang disusun berdasarkan data, informasi, serta pengalaman yang lengkap. Kesesuaian antara aktivitas yang dilakukan dengan perencanaan yang dibuat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pada Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton.

Dari segi pengendalian, anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton juga telah berfungsi sebagai alat pengendalian karena jumlah anggaran didasarkan atas angka standar yang sudah diperhitungkan secara cermat dan juga berfungsi sebagai alat penilai efisiensi dimana angka standar yang dipakai memang efektif sehingga realisasi biaya yang melebihi atau kurang dari jumlah yang dianggarkan dianggap merupakan pemborosan/penghematan yang sebenarnya. Dengan demikian selisih biaya (analisis variance) benar benar dapat dinilai penyimpangan dari yang seharusnya untuk kemudian dilakukan tindakan perbaikan sebelum akhir periode yaitu setiap tiga bulan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian dan pembahasan penyusunan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian Hal itu dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran yang anggaran belanjanya tidak satupun mengalami penyimpangan yang tidak menguntungkan (realisasi tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan) sehingga penyimpangan menguntungkan ini akan menjadi penghematan dimana dalam

penyusunan anggaran, Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Kabupaten Buton menggunakan data dan informasi yang bersumber dari pengalaman dan juga data aktual tahun-tahun sebelumnya.

5. SARAN

Berikut ini saran yang dapat penulis diberikan untuk kebaikan dan kemajuan Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, yaitu : Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton sebaiknya tetap dipertahankan dan lebih cermat dalam menyusun anggaran agar asumsi-asumsi yang tidak sesuai yang menyebabkan beberapa anggaran melebihi realisasinya dapat diminimalisasi, Dalam penyusunan anggaran sebaiknya Badan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton tidak hanya menggunakan data dan informasi dari data actual tahun-tahun sebelumnya tetapi juga harus melihat keadaan atau kondisi ke depan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Saipi, A, R., Tinangon, J., Suwetja, I., 2018. *Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Kas Pada PT Pelabuhan IV Cabang Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (2).
- [2] Irwadi, M, 2015. *Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang*. Jurnal Akuntansi Politeknik Sukayu. ISSN-P 2407-2184.
- [3] Afifah, Z, U., Puspitaningtyas, Z., Puspita, Y., 2017. *Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Kinerja Pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Akrindo) Cabang Jember Periode 2014-2016*. E-SOSPOL Volume 4 Edisi Mei.
- [4] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- [5] Walidin, W., Saifullah, Tabrani, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. FTK Ar-Rainy Press. Banda Aceh.

- [6] Soejono dan Abdurrahman, 2011. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- [7] Sutrisno, Hadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- [8] Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Rudianto, 2009. *Penganggaran*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- [10] Sasongko, C., Parulin, S, R., 2015. *Anggaran*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.